

**PENGARUH SUBSIDI DARI PEMERINTAH PUSAT DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH KABUPATEN JEMBER
1990/1991-1999/2000**

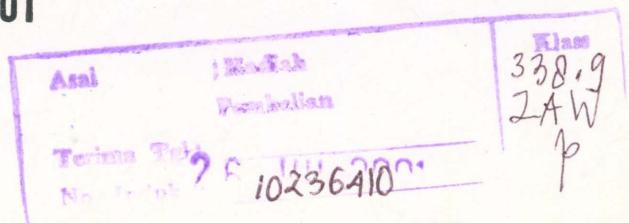
SKRIPSI



Oleh

Roychan Zawawi
NIM : 960810101102

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2001**



JUDUL SKRIPSI

PENGARUH SUBSIDI DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN JEMBER
1990/1991 - 1999/2000

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : Roychan Zawawi

N. I. M. : 960810101102

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

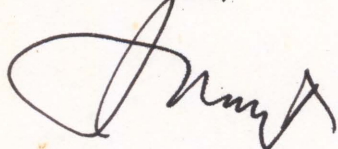
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

26 Mei 2001

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar **S a r j a n a** dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

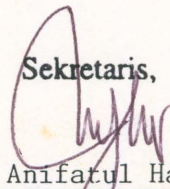
Ketua,



Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes.

NIP. 131 624 478

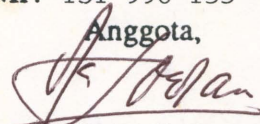
Sekretaris,



Dra. Anifatul Hanim

NIP. 131 996 155

Anggota,



Drs. Bambang Yudono, MM.

NIP. 130 355 409



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Drs. H. Liakip, SU.

NIP. 130 531 976

TANDA PERSETUJUAN

Judul : Pengaruh Subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 1990/1991-1999/2000

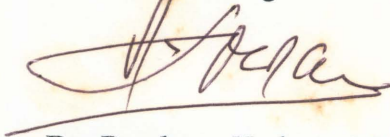
Nama Mahasiswa : Roychan Zawawi

NIM : 960810101102

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan

Pembimbing I



Drs. Bambang Yudono, MM

NIP.130355409

Pembimbing II



Drs. Sonny Sumarsono, MM

NIP.131759836

Ketua Jurusan



Dra. Aminah, MM

NIP.130676291

Tanggal Persetujuan: Juni 2001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ *Ayahanda yang sangat kuhormati dan kucintai, "Abdul Sawawi", yang tak lelah memberi semangat, do'a, dan berkorban tanpa kenal putus harapan.*
- ❖ *Obunda yang sangat kusayang dan kucintai, "Nuzhayati Karim", yang tak jemu untuk memberi do'a dan restunya untuk kebahagiaan putra-putrinya.*
- ❖ *Kakakku tersayang Wildan Karim, Syafaat Karim dan Adikku tersayang Putri Sari*
- ❖ *Okhwah Fillah, yang tak kenal lelah dan bosan dalam Djomatuddin*

MOTTO

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"
(terjemahan Al Baqarak: 286)*

*"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"
(terjemahan Al Mujaadallak: 11)*

*Ilmu adalah penghibur dikala sendiri, teman dikala sepi, penunjuk kepada agama,
pembuat sabar dikala suka dan duka, menteri dikala ada teman-teman, kerabat dikala
dalam kalangan orang asing dan sebagai menara jalan ke surga*

*Pelajarilah ilmu karena sesungguhnya belajarnya karena Allah SWT itu adalah
taqwa, menuntut ilmu adalah ibadah, mempelajarinya adalah tasbik, membacanya
adalah jihad, mengajarkannya kepada keluarga adalah pendekatan diri kepada Allah*

SWT

(Mu'adz bin Jabbal r.a)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember pada Tahun 1990/1991-1999/2000.

Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan ditransformasikan kedalam fungsi logaritma. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah dengan menggunakan uji-F dan uji-t.

Hasil Analisis Regresi Berganda menunjukkan bahwa variabel Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD sebagai variabel terikat berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember variabel bebas. Hasil uji statistik, dengan uji-F bahwa variabel Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 1990/1991-1999/2000. Dan uji t menunjukkan bahwa variabel Subsidi Dari Pemerintah Pusat dan PAD secara individu berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember Tahun 1990/1991-1999/2000.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa besarnya Subsidi yang diberikan dan PAD yang diperoleh daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dengan meningkatkan pertumbuhan perekonomian akan meningkatkan penerimaan daerah sehingga menciptakan otonomi yang semakin nyata dan bertanggung jawab. PDRB secara tidak langsung mempengaruhi Penerimaan Daerah DATI II Kabupaten Jember melainkan melalui sektor pajak dan retribusi. dan Peningkatan Subsidi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah berkaitan dengan potensi daerah.

Key words: Subsidi dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

Kata Pengantar

Kami Panjatkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya semata maka skripsi ini dapat kami selesaikan sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Penelitian ini berjudul "Pengaruh Subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember Tahun 1990/1991-1999/2000.

Salah satu faktor penghambat yang serius dirasakan dalam penelitian ini adalah keterbatasan data yang dihimpun. Namun dengan adanya pengertian dan kerjasama yang baik dari para nara sumber data seperti BPS, Bappeda Kabupaten Jember, Perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Fakultas Ekonomi, dan lain-lain, akhirnya hambatan tersebut dapat teratasi. Atas semua itu melalui media skripsi ini kami sampaikan rasa terimakasih yang tiada terhingga.

Ucapan terima kasih yang dalam juga tidak pula kami sampaikan kepada:

1. Drs. Liakip, SU selaku Dekan FE Universitas Jember
2. Dra. Aminah, MM selaku Ketua Jurusan IESP
3. Drs. Bambang Yudono, MM selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. Sonny Sumarsono, MM selaku Dosen Pembimbing II
4. Pimpinan dan Staf kantor BPS Kabupaten Jember
5. Staf dan Karyawan Perpustakaan FE Unej
6. Rekan-rekan di SP/GP'96
7. Ukhti Wie' atas CD analisisnya dan segala keterbukaannya
8. Ikhwan2 seperjuangan "Tetaplah teguh pendirianmu, hanya untuk Iqomattudien"

9. Rekan-rekan Sumatera II/16 dan santri-santri cilik yang tak kenal jemu untuk menuntut ilmu
10. Dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang berkompeten. namun yang utama menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Jember, 17 Juni 2001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	7
2.2 Landasan Teori.....	10
2.3 Hipotesis.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian.....	25
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.3 Metode Analisa Data.....	25
3.4 Definisi Variabel Operasional.....	29
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek yang Diteliti.....	30

4.2 Analisis.....	38
4.3 Pembahasan.....	41
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	44
5.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Subsidi dari Pemerintah Pusat pada Kabupaten Jember	31
Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah.....	32
Tabel 3 PDRB atas harga konstan Kabupten Jember	33
Tabel 3 Rata-rata perkembangan PDR menurut harga konstanpada masing-masing sektor-sektor di Kabupaten Jember.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Subsidi dari Pemerintah Pusat pada Kabupaten Jember Tahun 1990/1991-1999/2000	45
Lampiran 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember tahun 1990/1991-1999/2000	46
Lampiran 3 Produk Domestik Regional Bruto menurut harga konstan pada Kabupaten Jember tahun 1990/1991-1999/2000.....	47
Lampiran 4 Analisis Regresi untuk mengetahui Pengaruh Subsidi dari Pemerintah Pusat terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember.....	48
Lampiran 5 Kriteria F test dengan uji signifikansi satu arah dan tingkat keyakinan 95% untuk variabel Subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah	50
Lampiran 6 Kurva Daerah Penolakan dan Penerimaan dengan Uji t Dua Arah pada Tingkat Keyakinan 95% untuk Variabel Subsidi dari Pemerintah Pusat	51
Lampiran 7 Kurva Daerah Penolakan dan Penerimaan Dengan Uji t Dua Arah pada Tingkat Keyakinan 95% untuk Variabel Pendapatan Asli Daerah	52

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan jangka panjang antara lain ditandai dengan adanya suatu peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan industrialisasi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan dan perluasan peran serta masyarakat, serta *Outward-looking Oriented Regional* maupun internasional. Titik berat dalam jangka panjang adalah pembangunan dibidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara sektor pertanian dan industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.

Tujuan pembangunan nasional ditetapkan menurut TAP MPR no.11/MPR/1998. "Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila di dalam suatu wadah negara kesatuan RI yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat. Dalam suasana perikehidupan bangsa yang tentram, tertib dan dinamis "(GBHN, 1998 : 370).

Proses pembangunan ekonomi nasional akan efisien jika memenuhi tiga ciri pokok yaitu: (1) ekonomi ini mampu memproduksi output nasional sesuai dengan preferinsi sosial yang ada secara optimal dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam suasana kompetisi yang sehat. (2) tercapainya tingkat yang optimal dalam produksi barang dan jasa yang mencerminkan distribusi pendapatan yang ada. (3) ekonomi ini dilandasi dengan kondisi-kondisi yang kukuh untuk melakukan ekspansi yang optimal pada masa-masa yang akan datang (Arief, 1998:55).

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertumpu pada tiologi pembangunan. Untuk mempercepat

pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat perlu memberdayakan pelaku dan potensi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan ekonomi sejalan dengan otonomi daerah. Pembangunan seluruh daerah perlu ditingkatkan terutama dikawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya berdasarkan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Paradigma pembangunan, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah merupakan tujuan utama. Ketidakmerataan ini akan menimbulkan kemajuan bagi daerah yang bersangkutan. Pemerataan pembangunan dibatasi oleh ketidakmerataan antar golongan penduduk, antar sektor dan antar daerah (Sumodingrat, 1996:27). Pemahaman terhadap masalah ketidakmerataan antar golongan penduduk dapat dilakukan dengan melihat pergeseran distribusi pendapatan. Pemerataan pendapatan oleh kelompok penduduk akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi regional.

Kesenjangan antar golongan penduduk mempunyai kaitan yang erat dengan kesenjangan pengembangan antar sektor, terutama sektor ekonomi. Umumnya yang menjadi antara lain pengembangan sektor ekonomi industri dan jasa. Diharapkan dengan pengembangan ekonomi prioritas akan lebih meningkatkan aktivitas ekonomi (Sumodingrat, 1996:27).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Ditekankan pada tiga aspek, yaitu proses output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ada apabila lebih banyak yang meliputi penggunaan lebih banyak input dan lebih efisien, yaitu adanya kenaikan output persatuan input. Perkembangan dan pembangunan ekonomi terjadi apabila tidak hanya kenaikan output persatuan input tetapi juga perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak (Irawan dan Suparmoko, 1995:6). Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi

sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduk, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagan ideologis yang diperlukan. Definisi ini mempunyai 3 komponen yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dari meningkatnya secara terus-menerus; kedua, teknologi maju merupakan faktor dari pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan barang dan kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan sebagai inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dinyatakan secara tepat. Teori pertumbuhan ekonomi merupakan teori jangka panjang. Teori ini memusatkan perhatian pada efek investasi dalam meningkatkan pendapatan potensial dan mengabaikan fluktuasi jangka pendek dari pendapatan nasional aktual disekitar pendapatan potensial. Dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dengan melihat seberapa besar produksi barang dan jasa yang dihasilkan melalui jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ekonomi suatu daerah. Disamping itu, PDRB juga dapat digunakan sebagai alat melihat struktur perekonomian daerah melalui peranan setiap lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB daerah yang bersangkutan (Nota Keuangan negara, 1999:69).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tahun 1995/96 ditunjukkan oleh kenaikan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 1993, sebesar 8,71%. Dimana laju pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,60 % dengan menggunakan tahun dasar 1993. Tumbuhnya sektor sektor ekonomi di Kabupaten Jember telah memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dan lebih cepat telah mendorong pada peningkatan produk barang dan jasa. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah PDRB di Kabupaten Jember dari tahun

ketahun. Dengan peningkatan dari jumlah produksi dari sektor-sektor yang memberikan nilai tambah yang cukup tersebut akan mempengaruhi penerimaan daerah terutama pada sektor pajak dan retribusi.

Pada Pemerintah Daerah di Indonesia, subsidi merupakan unsur yang sangat penting bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian sekitar tahun 1990 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah pada subsidi dari Pemerintah Pusat adalah kurang dari 80 % dari keseluruhan sumber pendapatan daerah yang harus disediakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Birawan, 1992:42).

Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah otonom di propinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang mempunyai PAD terbesar ketiga di Propinsi Jawa Timur setelah Kotamadya Surabaya dan Kotamadya Malang sangat berpotensi untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Dalam usaha mengembangkan daerahnya dipandang perlu untuk menghubungkan faktor-faktor yang menguntungkan dan pelaksanaannya dilakukan seoptimal mungkin dengan mengandalkan sumber pembiayaan yang digali dari kemampuan sendiri.

Pada tahun 1997/98 jumlah PAD Kabupaten Jember sebesar Rp 17,467 milyar meningkat sebesar 39,57% pada tahun 1998/99 menjadi Rp24,375 milyar. Hal ini disebabkan peningkatan yang cukup besar dari pendapat BUMD kemudian diikuti oleh pendapatan yang cukup meningkat dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dibandingkan dengan negara berkembang lainnya juga dapat dikatakan bahwa sistem keuangan negara di Indonesia sangat terpusat dalam artian sangat tergantung pada subsidi yang diberikan. Di India, daerahnya mempunyai tingkat kemandirian keuangan sebesar 65% jauh lebih besar dari Indonesia. Dan di Cina, daerahnya mampu membiayai seluruh pengeluaran dari penerimaan sendiri, hal ini ditunjukkan oleh rasio

porsi daerah terhadap pengeluaran dibandingkan penerimaan mencapai 100% (Riphat, 2000:3).

Subsidi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah digunakan untuk pembangunan proyek-proyek di daerah guna pengembangan ekonomi daerah. (Devas, 1989:26).Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II (Kotamadya/Kabupaten) selama ini masih tergantung pada Subsidi dari Pemerintah Pusat, begitu pula Kabupaten Jember.Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan yang berasal dari Subsidi dari Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1997/98 sebesar Rp 14.051.046.000 dan pada Tahun Anggaran 1998/99 meningkat sebesar Rp 134.009.118.000.Hal ini menunjukkan bahwa adanya krisis ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menghimpun penerimaannya, maka Subsidi dari Pemerintah Pusat masih sangat diperlukan.

1.2 Perumusan Permasalahan

Pembangunan di daerah didalam pelaksanaannya didalam pelaksanaannya memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Apalagi hal ini akan diterapkannya UU Otonomi Daerah, dimana DATI II diharapkan meningkatnya tingkat Kemandirian Daerah. Laju pertumbuhan realisasi total penerimaan APBD Kabupaten Jember yang menunjukkan kemampuan daerah, antara lain disebabkan oleh jumlah PAD dan Subsidi dari Pemerintah Pusat akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian daerah. Perekonomian daerah akan berpengaruh terhadap Subsidi yang diberikan.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk bertujuan mengetahui pengaruh faktor Subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 1990/1991-1999/2000

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yaitu bagi khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangan konsep keuangan daerah khususnya serta sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.



II. Tinjauan Pustaka

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

- a. Penelitian Prawiroardjo (1999), menjelaskan variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Perekonomian Daerah adalah potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut, sarana dan prasarana publik, dan subsidi dari pemerintah pusat. Pada hasil penelitian yang dilakukan Prawiroardjo dengan menggunakan uji F sebagai prosedur untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama menghasilkan F hitung sebesar 176,58 dan F tabel sebesar 3,26, sehingga nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya variabel potensi ekonomi, variabel sarana dan prasarana publik, dan subsidi dari pemerintah pusat berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Sedangkan pada uji t, diketahui variabel potensi ekonomi t hitung=3,456, variabel sarana dan prasarana publik t hitung=2,89, dan variabel subsidi dari pemerintah pusat t hitung =5,674 sedangkan t tabel=2,341. Artinya variabel potensi ekonomi, sarana dan prasarana publik, dan subsidi dari pemerintah pusat secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Potensi ekonomi yang dimiliki daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisiennya sebesar 0,707, artinya apabila potensi ekonomi meningkat 100% pertumbuhan perekonomian daerah meningkat 70,7%. Hal ini terjadi karena apabila potensi ekonomi daerah yang dimiliki diolah dengan baik maka akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga perekonomian daerah akan meningkat pula. Sarana dan prasarana publik berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai koefisiennya sebesar 0,689, artinya apabila sarana dan prasarana meningkat 100%

disebabkan apabila sarana dan prasana publik di daerah tersebut tersedia maka arus barang dan jasa lebih mudah tersebar sehingga tingkat perekonomian meningkat. Subsidi dari Pemerintah Pusat terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Nilai koefisiennya 0.987, artinya apabila subsidi yang diberikan meningkat sebesar 1005 maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 98,7%. Pemerintah Daerah Kotamadya Malang tingkat ketergantungan masih sangat tinggi terhadap subsidi pemerintah pusat. Dimana Subsidi tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek dan menggali potensi ekonomi yang ada agar efektif bagi perkembangan perekonomian daerah. Dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya PAD maka tingkat kemandirian daerah tersebut meningkat .

- b. Penelitian yang dilakukan Siswoyo (1998) dengan judul "Variabel-variabel yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupten Sidoarjo tahun 1988-1997. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupeten Sidoarjo. Hal ini diketahui melalui analisis uji t , dimana variabel PAD t hitung=3,456 dan variabel tingkat pendidikan masyarakat t hitung=2,579, sedangkan t tabel =2,365. Maka t hitung dari masing-masing variabel bebas tersebut yaitu variabel PAD dan tingkat pendidikan masyarakat lebih besar dari tabel sehingga H_a diterima dan H_o ditolak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Usaha menanggulangi kondisi-kondisi keterbelakangan terutama dibidang ekonomi, seringkali dipakai alat perencanaan. Sektor-sektor pembangunan di daerah diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas.

Pengertian Pertumbuhan adalah suatu proses yang berlangsung dalam rangka meningkatkan produksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Cepat lambatnya proses pertumbuhan itu intensitasnya tergantung dari kemampuan yang dapat dibina dan diarahkan secara efisien. Masalah pertumbuhan tersebut tidak dapat terlepas dari tingkat produk yang dihasilkan oleh suatu masyarakat daerah tertentu.

Pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang artinya timbul dan bertambah besar. Pengertian Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan proses kenaikan output perkapita dan jangka panjang (Irawan dan Suparmoko, 1995:6). Pertumbuhan ekonomi dikatakan baik apabila terdapat lebih banyak output yang meliputi penggunaan lebih banyak input dan lebih efisien. Pertumbuhan ekonomi ada apabila tidak hanya terdapat perubahan –perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan tehnik dalam menghasilkan output yang lebih banyak.

Kuznets mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan untuk menyediakan semakin banyak jenis barang dan jasa kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan ideologis yang diperlukan.

Teori Harrod-Dommar pada hakikatnya berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau steady growth yang didefinisikan sebagai pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya alat-alat modal akan selalu berlaku dalam ekonomi. Dalam teori Harrod-Dommar (Sukirno, 1985:287) bahwa

pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan sesuatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Peranan pembentukan modal ini berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan pusat dari persoalan yang mantap, sebab proses investasi itu mempunyai 2 sifat yaitu menciptakan pendapatan dan menaikkan kapasitas produksi dalam perekonomian.

Menurut teori klasik (Sukirno, 1985:286) bahwa pembentukan modal adalah pengeluaran yang mempertinggi jumlah alat-alat modal dalam masyarakat. Kalau kesanggupan tersebut bertambah, maka dengan sendirinya produksi dan pendapatan nasional akan bertambah tinggi dan pembangunan akan tercipta. Kaum Klasik berpendapat bahwa "*supply creates its own demand*". Berarti bertambahnya alat-alat modal yang terdapat dalam masyarakat akan dengan sendirinya menciptakan pertambahan produksi nasional dan pembangunan/pertumbuhan ekonomi.

Teori Pertumbuhan ekonomi merupakan teori jangka panjang. Teori ini memusatkan perhatian pada efek investasi dalam meningkatkan pendapat potensial dan mengabaikan fluktuasi jangka pendek dari pendapatan nasional aktual disekitar pendapatan potensial. Dari hasil-hasil analisa faktor yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan bahwa tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) tanah dan kekayaan alam lainnya (2) Jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, (3) barang modal dan teknologi, (4) sistem sosial dan sikap masyarakat, (5) luas pasar sebagai sumber pertumbuhan (Soekirno, 1985:425).

2.2.2 Subsidi dari Pemerintah Pusat

Subsidi atau Block Grant adalah sumbangan yang diberikan dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Subsidi ini mempunyai peranan penting dalam mencapai keseimbangan pembangunan daerah dengan mengurangi kesenjangan dalam pendapatan regional (Suparmoko, 1990:317). Pengeluaran langsung Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam setiap tahun anggaran berupa investasi dan bantuan dapat menolong mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Hakikat dari subsidi atau grants adalah untuk memperkuat tingkat ekonomi suatu daerah. Dengan pemberian subsidi justru harus memperkuat kegiatan daerah baik yang menimbulkan manfaat kedalam wilayah daerah (internal benefit) maupun menimbulkan manfaat keluar (eksternal benefit). Adanya subsidi justru tidak boleh menurunkan kegiatan daerah yang berasal dari kekuatan dan kemampuan sendiri. Subsidi tidak boleh mengakibatkan daerah menjadi kontra produktif.

Subsidi atau grants dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis yaitu: (a) *block grants*; (b) *conditional grants*; dan (c) *matching grants*. *Block grant* adalah subsidi yang diberikan pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah yang penggunaannya adalah bebas, tidak ada pengarahan dari pusat. *Conditional grant* adalah subsidi yang penggunaannya oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan pengarahan pusat, misalnya harus digunakan pada proyek-proyek tertentu. *Matching grant* adalah lanjutan dari *conditional grant* yaitu subsidi membiayai proyek-proyek yang juga dibiayai Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat hanya memberikan subsidi apabila Pemerintah Daerah mempunyai sejumlah dana tertentu.

Subsidi Pemerintah Pusat akan dapat meningkatkan perekonomian daerah yang diwujudkan peningkatan Pendapatan Regional, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan perolehan kapasitas perpajakan dan

memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang bersangkutan. Penelitian mengenai pendapatan regional dan disparitas harga di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan besar dalam pendapatan riil perkapita di berbagai daerah. Apabila pendapatan perkapita (setelah diadakan penyesuaian kebutuhan hidup dasar) dapat dijadikan indikator bagi kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pajak, maka dapat dihitung pula tingkat "usaha memungut pajak" (tax effort) dengan cara membagi pendapatan perkapita yang telah disesuaikan tersebut dengan penerimaan pajak perkapita. Disamping itu dapat mengaitkan pola subsidi Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah untuk meningkatkan penerimaannya, dan melihat sampai seberapa jauh kemampuan ini dimanfaatkan.

Sejalan dengan upaya memperkuat otonomi daerah atau penigkatan PAD, maka Subsidi dari Pemerintah Pusat sesungguhnya merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat memacu/mendorong peningkatan perekonomian daerah dan PAD tersebut, dan bukan sebaliknya. Hal ini antara lain ditekankan oleh Arsjad (1992) bahwa "Hakikat subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah, karena itu daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi penigkatan PAD". Adanya kebebasan atau keleluasaan dalam menggunakan Subsidi dari Pemerintah Pusat menyebabkan daerah betul-betul dapat memprioritaskan kegiatan yang bisa mendorong peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Besarnya subsidi daerah otonom yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah khususnya daerah tingkat II memegang peranan penting dalam peningkatkan pertumbuhan ekonomi. Subsidi dari Pemerintah Pusat digunakan antara lain untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Davey, 1988:56)

Dalam hal otonomi keuangan daerah, hubungan antara bantuan pemerintah pusat dengan tingkat perkembangan perekonomian daerah mempunyai pengaruh yang signifikan. Tingkat perekonomian daerah dipengaruhi oleh anggaran pengeluaran daerah yang sumbernya penerimaan potensial dari block grants dan PAD. Dalam jangka panjang, bantuan Pemerintah Pusat ini mengalami penurunan dan diharapkan hanya menjadi pelengkap penyusunan APBD.

Hubungan antara subsidi dan PAD dengan perubahan derajat otonomi fiskal daerah melalui proses yang sangat kompleks, dan biasanya bisa terjadi dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta dapat diukur satu tahun kemudian. Semakin tinggi tingkat perkembangan suatu daerah semakin tinggi pula derajat otonomi fiskal daerah tersebut.

Penerimaan dari subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat berupa:

1. Ganjaran

Ganjaran adalah jumlah uang yang diserahkan kepada daerah berhubung dengan kewajiban menyelenggarakan tugas negara atau jumlah uang yang diserahkan kepada daerah berhubung tugas negara telah menjadi urusan rumah tangga daerah.

2. Sumbangan

Adalah bantuan kepada daerah untuk menutupi kekurangan anggaran keuangan daerah, oleh karena keadaan luar biasa yang mengakibatkan daerah mengalami kesulitan keuangan.

3. Subsidi

Adalah bantuan yang diberikan kepada daerah untuk penyelenggaraan usaha-usaha daerah yang biayanya melampaui keuangan daerah.

4. *Revenue Sharing*

Adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah pusat yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. Di Indonesia *Revenue*

Sharing ini diatur dalam UU no.32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan. *Revenue Sharing* dibedakan atas *Conditional Grant in Aid* dan *Unconditional Grant in Aid*.

Conditional Grant in Aid adalah bantuan pemerintah di atasnya terhadap pemerintah ditingkat yang lebih bawah dengan menyebutkan persyaratan-persyaratan atau peraturan yang bersifat spesifik. Misalnya untuk perbaikan jalan, pemberian tunjangan pensiun, proyek inpres dan lain-lain.

Sedangkan *Unconditional Grant in Aid* adalah bantuan dari pemerintah di atasnya dengan tidak menyebutkan syarat-syarat atau penggunaan khusus. Pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk mencapai alokasi sumber daya yang optimal.

Subsidi yang diberikan kepada daerah dapat berupa (Raharjo, 1985:129):

1. Subsidi Umum

Subsidi ini digunakan untuk belanja rutin yang diprioritaskan untuk membiayai belanja pegawai daerah dan sisanya digunakan untuk membiayai belanja pembangunan dengan dasar perhitungan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat harga, dan dibagi sama dengan daerah.

2. Subsidi Khusus

Subsidi ini diberikan kepada daerah yang relatif terbelakang serta dengan memperhatikan kemajuan dan kemampuan daerah dalam menggunakan subsidi khusus sebaik-baiknya, dan untuk membantu sektor yang terbelakang.

3. Subsidi Tambahan

Subsidi ini diberikan kepada daerah sebagai kompensasi terhadap penurunan penerimaan, terjadinya bencana alam dan lain-lain.

Besarnya subsidi daerah otonom yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah khususnya daerah tingkat II memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Subsidi dari Pemerintah

Pusat digunakan antara lain untuk membiayai proyek-proyek atau pembangunan di daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Davey, 1988:56)

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keuangan daerah, menurut kajian ini adalah alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan, dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah makin penting selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan, tetapi juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat daerah. Selain itu peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber pendapatn yang benar-benar diperoleh dan dipergunakan oleh daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin besar PAD yang diterima berarti pula bahwa kemampuan dalam melaksanakan pembangunan lebih baik, dan semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka bisa dikatakan daerah itu semakin mandiri.

Ibnu Syamsi (Kamaluddin, 1984:3) menjelaskan bahwa penerimaan daerah sebenarnya memang diharapkan dari PAD, sebagai penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD maka semakin tinggi kualitas otonominya. Kemudian jika ditinjau dari sudut kebijakan menurut

pemerintah daerah juga berfungsi sebagai *Regulatory* yaitu berfungsi sebagai pengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta menciptakan stabilitas ekonomi daerah (Arsjad, 1993:37).

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakai atau karena memperoleh jasa pekerjaan, Usaha Milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung ataupun tidak langsung.

Asas mengenai batasan pengenaan retribusi daerah tercantum dalam pasal 5 Peraturan Umum Retribusi Daerah yaitu:

1. Retribusi Daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang ke dalam dan keluar.
2. Dalam peraturan retribusi daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perorangan, golongan, dan agama.

Macam-macam retribusi daerah yang dipungut pemerintah daerah guna menambah pendapatan daerah menurut peraturan umum retribusi daerah dalam UU no.12 tahun 1957 pada pasal 8 yaitu (Soetrisno, 1990:214): uang leges, uang tol, bea pangkalan, bea pembantaian dan pemeriksaan hewan, uang sepadan dan ijin bangunan, retribusi atas pemakaian tanah dan bea pengubuan.

c. Hasil laba dari BUMD

Menurut Penjelasan UU no.5/1974, yang dimaksud dengan BUMD adalah badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah.

Penjelasan tentang perusahaan daerah terlihat pada pasal 59 UU no.5/1974 yaitu:

- Pemerintah Daerah dapat mengadakan perusahaan daerah yang penyelenggaraan dan pembiayaannya berdasarkan asas ekonomi perusahaan.
- Dengan UU ditetapkan ketentuan pokok tentang perusahaan daerah.

Adapun fungsi dari BUMD adalah:

1. BUMD harus dapat mengembangkan perekonomian daerah

BUMD harus dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan penduduk di daerah oleh sebab itu pendirian BUMD harus dapat bermanfaat bagi masyarakat di daerah, misalnya Perusahaan Air Minum, Bank Pembangunan Daerah, dan lain-lain.

2. BUMD dapat meningkatkan PAD

Bahwa BUMD diharapkan bisa menambah hasil dan keuntungan sebab hasil dan keuntungan yang diperoleh dapat mengisi kas daerah tersebut.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Sumber pendapatan lain-lain adalah pendapatan dari dinas-dinas daerah dan pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh Pemerintah Daerah.

Dinas-dinas daerah, walaupun tugas dan fungsinya usahanya yaitu memberikan pelayanan umum, terhadap masyarakat tanpa perlu memperhitungkan keuntungan dan kerugian tetapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan untuk bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan dan imbalan jasa.

Menurut Pasal UU no5 tahun 1974 menjelaskan bahwa dinas-dinas daerah adalah:

Unsur pelaksanaan pemerintah daerah

Pembentukan, susunan organisasi dan formasi dinas daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

Sumber PAD sebagaimana tersebut diatas adal sebagai pungutan langsung yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari Pemerintah

Daerah. Pajak daerah secara teori dikehendaki dapat memenuhi beberapa persyaratan diantaranya pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat. Pajak Daerah harus sederhana dan tidak terlalu dan banyak jenisnya, pajak daerah tidak mencampuri sistem perpajakan pusat, sedangkan perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan ekonomi daerah dan untuk menambah penghasilan daerah (Team PAFPACK, 1994:22)

2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto

Pelaksanaan tujuan pembangunan pada suatu negara atau daerah maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan secara menyeluruh sehingga akan diperoleh hasil yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Misalnya perencanaan yang disusun dalam suatu sektor ekonomi tertentu dari suatu daerah, maka biasanya target yang ingin dicapai adalah adanya peningkatan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang bersangkutan.

PDRB merupakan salah satu ukuran dari tingkat pendapatan masyarakat dapat digunakan sebagai salah satu bahan perencanaan pembangunan regional dibidang ekonomi. Data PDRB juga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan.

PDRB adalah nilai barang dan jasa yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha dalam batas wilayah tertentu. Lebih lanjut Dourbusch (1986) menyatakan bahwa PDB atau PDRB adalah nilai dari barang-barang jadi dan jasa yang diproduksi. Penekanan pada barang jadi dan jasa adalah untuk meyakinkan bahwa kita tidak melakukan perhitungan ganda. Dalam praktik, perhitungan ganda dihindari dengan menerapkan nilai tambah. Pada setiap tingkatan dari perubahan suatu barang, hanya nilai yang ditambahkan pada barang ditingkat pembuatan itu yang dihitung sebagai bagian dari

PDRB. Nilai tambahan bruto merupakan produk dari proses produksi, yang terdiri dari komponen faktor pendapatan, penyusutan barang modal tetap dan pajak tidak langsung netto, dan jika penyusutan dikeluarkan dari nilai tambah bruto maka akan diperoleh nilai tambah netto.

PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

Konsep perhitungan yang digunakan untuk mengetahui besarnya nilai PDRB dapat digunakan dengan tiga cara sebagai berikut:

1. Konsep Perhitungan PDRB menurut Produksi

Adalah seluruh jumlah nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi didalam suatu region/wilayah dalam jangka waktu tertentu. Penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha yaitu :

1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan
9. Jasa-jasa

2. Konsep Perhitungan PDRB menurut Pendapatan

Adalah nilai jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu region dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud adalah upah, gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan yang sebelumnya dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3. Konsep Perhitungan PDRB menurut Pengeluaran

Adalah nilai jumlah seluruh pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, konsumen lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, konsumen pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stock dan ekspor netto disuatu region dalam jangka waktu tertentu.

Ekspor netto merupakan ekspor dikurangi impor. Ekspor dalam hal ini tidak terbatas hanya ke Luar negeri, tetapi termasuk juga yang keluar daerah/wilayah baik lewat darat, laut maupun udara.

Penerimaan Pajak mempunyai hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi, jadi penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi (dalam hal ini pertumbuhan PDRB)

Pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang amat kuat dan langsung dengan penerimaan pajak dan retribusi. Hal ini dapat dijelaskan sebab pajak dan retribusi diperoleh dari nilai hasil seluruh proses produksi dalam satu tahun sebesar tarif pajak atau retribusi yang ditetapkan. Peningkatan PDRB ini berkaitan dengan peningkatan produksi dari barang dan jasa yang dihasilkan, dari peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan pola konsumsi masyarakat. Dimana hubungan antara peningkatan/pertumbuhan PDRB berkaitan erat dengan pajak produksi, pajak pendapatan serta pajak konsumsi. Pertumbuhan PDRB direfleksikan sebagai pertumbuhan dari sektor-sektor produksi, dimana sektor-sektor tersebut dikenakan beban pajak, baik itu berupa pajak penjualan, pajak perseroan, pajak bea masuk serta pajak konsumsi atas barang yang diperoleh. Dimana hasil pemungutan Pajak tersebut akan diserahkan sebagian kepada daerah, baik daerah tingkat I dan daerah tingkat II melalui *Revenue Sharing System* yang persentase pembagiannya ditetapkan setiap tahun melalui peraturan pemerintah (Arsjad, 1992:113).

2.3 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan menjawab permasalahan dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini yaitu bahwa Subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember

III. Metode Penelitian

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan bersifat *ecpose facto* (mempelajari fenomena yang sudah terjadi). Tempat dan kegiatan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember. Hal ini disebabkan data-data observasi yang diperlukan semuanya tersedia di Kantor BPS Jember yang diambil dari buku "Jember dalam Angka" dan "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember" pada tahun 1990-2000. Penelitian ini menggunakan variabel Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD sebagai variabel bebas dan variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember sebagai variabel terikatnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dalam bentuk runtun waktu (*time series*) yang bersifat kuantitatif yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Tk II Jember dari Tahun 1990/1991-1999/2000 serta studi literatur yang sesuai dengan penelitian ini.

3.3 Metode Analisis Data

Tujuan penyusunan model analisis adalah untuk menyederhanakan masalah, sehingga bukti-bukti kuantitatif yang mendukung fenomena ekonomi dapat diperoleh dan diamati. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Sebagai berikut:

Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisa hipotesis pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara serentak maupun parsial digunakan Model Analisis Berganda. Menurut Gujarati (1995:28) model regresi untuk menganalisa atas dasar Population Regression Function (PRF) sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + e$$

Yang kemudian ditransformasikan kedalam fungsi logaritma, sebagai berikut:

$$\log Y = \beta_0 + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \dots + \log e$$

Keterangan:

log Y	=Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember
log X ₁	=Subsidi dari Pemerintah Pusat
log X ₂	=Pendapatan Asli Daerah
β ₀	=Konstanta
β ₁ , β ₂ ,	=Koefisien Regresi
e	=variabel pengganggu

Untuk mengetahui besarnya persentase kontribusi variabel bebas terhadap naik turunnya variabel terikat (Supranto, 1990:206)

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum X_1 y_i + \beta_2 \sum X_2 y_i}{\sum y_i^2}$$

Keterangan:

R^2 =Koefisien Determinasi

$\sum y_i^2$ =Jumlah Kuadrat Total

Pengujian Hipotesis secara statistik untuk mengetahui signifikansi dan besarnya pengaruh variabel bebas secara serentak/bersama-sama terhadap variabel terikat dengan uji-F (Soelistyo, 1982:224)

Keputusan untuk menolak atau menerima H_0 , dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Secara tepat dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

F =nilai F hitung

k =banyaknya variabel bebas

n =banyaknya sampel

R^2 =Koefisien Determinasi

$\sum y_i^2$ =Jumlah Kuadrat Total

Rumusan Hipotesa

1. $H_0: B_1, B_2, = 0$, artinya semua variabel bebas(X_1 dan X_2) secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat(Y)
2. $H_a: B_1, B_2, \neq 0$, artinya semua variabel bebas(X_1 dan X_2) secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat(Y).

Ketentuan

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, berarti H_0 diterima dan H_A ditolak
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti H_0 ditolak dan H_A diterima

Untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat digunakan uji-t (Soelistyo, 1982:216). Hipotesa yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

1. $H_0 : b_i = 0$, berarti variabel bebas (X_1, X_2, X_3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y)
2. $H_a : b_i \neq 0$, berarti variabel bebas (X_1, X_2, X_3) secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

Keputusan untuk menerima atau menolak H_0 , dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Secara tepat dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$t = \frac{b_i}{SE_{b_i}}$$

Keterangan :

t = nilai t hitung

b_i = besarnya perubahan dari X_1, X_2 , dan X_3

SE_{b_i} = standar error dari b_1, b_2 , dan b_3

Ketentuan :

1. Jika $t_{hitung} < -t_{tabel(\alpha/2)}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel(\alpha/2)}$ maka H_0 ditolak dan H_A diterima.
2. Jika $-t_{tabel(\alpha/2)} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel(\alpha/2)}$, maka H_0 diterima dan H_A ditolak.

3.5 Definisi Variabel Operasional

1. Subsidi dari Pemerintah Pusat adalah sumbangan/subsidi dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang digunakan untuk membantu membiayai pengeluaran daerah dalam APBD di Kabupaten Jember dalam satuan ribu rupiah.
2. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaa lain-lain yang sah.
3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember adalah peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Jember. Indikator dari pertumbuhan ekonomi ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha dalam wilayah tertetu .



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek yang Diteliti

4.1.1 Subsidi dari Pemerintah Pusat

Subsidi dari Pemerintah Pusat selama kurun waktu 10 tahun terakhir sejak tahun 1990/91-1999/00 telah mengalami peningkatan. Pada tahun 1990/91 subsidi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada DATI II Kabupaten Jember sebesar Rp 5.488.110.000 maka pada tahun 1999/00 Subsidi yang diberikan meningkat sebesar Rp 147.670.837.000

Jumlah Subsidi yang diterima oleh Kabupaten Jember yang berasal dari Pemerintah Pusat seperti yang terlihat pada tabel 1, terlihat bahwa jumlah Subsidi yang diterima dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan yang tertinggi terjadi pada tahun 1998/99 yaitu sebesar Rp 134.049.118.000 atau meningkat sebesar 854,37% dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang terendah terjadi pada tahun 1997/98 yaitu sebesar Rp 14.051.046.000 atau meningkat sebesar 3,35% dari tahun sebelumnya.

Tabel 1. Subsidi dari Pemerintah Pusat pada Kabupaten Jember tahun 1990/1991-1999/2000 (dalam ribuan rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Perkembangan	
			Rupiah	Persentase
1	1990/91	5.488.110,00		
2	1991/92	5.804.161,00	316.051,00	5,75
3	1992/93	7.698.748,00	1.894.587,00	32,64
4	1993/94	8.553.124,00	854.376,00	11,09
5	1994/95	9.368.108,00	814.984,00	9,52
6	1995/96	11.557.990,00	2.189.882,00	23,37
7	1996/97	13.595.222,00	2.037.232,00	17,62
8	1997/98	14.051.046,00	455.824,00	3,35
9	1998/99	134.099.118,00	120.148.072,00	854,37
10	1999/00	147.670.837,00	13.571.719,00	9,19
Rata-rata			15.872.157,33	107,42

Sumber: Jember dalam Angka tahun 1990-2000 (data diolah)

Menurut UU no.32/1952 pasal 6 menjelaskan bahwa subsidi yang diberikan pada daerah ditetapkan berdasarkan luas daerah, jumlah penduduk, potensi ekonomi, panjang jalan, dan letak geografis.

Faktor jumlah penduduk sangat dominan dalam menentukan jumlah subsidi yang diberikan. Hal ini disebabkan semakin banyak penduduk di suatu daerah maka akan semakin banyak pula barang dan jasa yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada penduduk setempat. Selain faktor jumlah penduduk, potensi ekonomi daerah dan kegiatan pemerintah daerah juga sangat dominan dalam menentukan besarnya subsidi yang diterima. Subsidi daerah digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek di daerah untuk pengembangan ekonomi daerah (Devas, 1989:26).

4.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 10 tahun sejak tahun 1990/1991-1999/2000 telah mengalami peningkatan dan penurunan secara signifikan. Pada tahun 1990/91 PAD yang diperoleh kabupaten Jember sebesar Rp 4.698.565.000 maka pada tahun 1999/2000 PAD yang diperoleh meningkat sebesar Rp 24.378.547.000.

Jumlah PAD yang diperoleh Kabupaten Jember seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini, terlihat bahwa jumlah PAD yang diterima oleh Kabupaten Jember dari tahun ke tahun cukup bervariasi. Pertumbuhan yang terbesar terjadi pada tahun 1996/97 dengan persentase peningkatannya sebesar 40,51 dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 1997/98 dengan persentase pertumbuhan sebesar -9,69 dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kabupten Jember tahun 1990/1991-1999/2000 (dalam ribuan rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Perkembangan	
			Rupiah	Persentase
1	1990/91	4.698.565,00		
2	1991/92	5.534.949,00	836.384,00	17,96
3	1992/93	6.494.500,00	959.551,00	17,34
4	1993/94	6.558.851,00	64.351,00	0,99
5	1994/95	8.110.296,00	1.551.445,00	23,65
6	1995/96	10.709.882,00	2.599.599,00	32,05
7	1996/97	15.048.073,00	433.819,00	40,51
8	1997/98	13.589.542,00	145.853,00	-9,69
9	1998/99	17.467.778,00	3.878.236,00	28,54
10	1999/00	24.378.547,00	6.910.236,00	39,56
Rata-rata			1.542.223,00	21,21

Sumber: Jember dalam Angka tahun 1990-2000 (data diolah)

4.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB DATI II Kabupaten Jember selama kurun waktu 1990/1991-1999/2000 telah mencapai peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 1990/91 PDRB atas harga konstan baru mencapai Rp 920.876.900 maka pada tahun 1999/2000 telah meningkat sebesar Rp 2.288.046.190. Pertumbuhan rata-rata PDRB DATI II Kabupaten Jember menurut harga yang konstan dari tahun 1990/91-1999/2000 sebesar 12,25%.

Jika melihat pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember menurut harga yang konstan seperti yang terlihat pada tabel 3, terlihat bahwa pertumbuhan setiap tahunnya cukup bervariasi. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 1992/93 dengan persentase peningkatannya sebesar 71,78% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada 1997/98 dengan persentase sebesar -7,57% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3. PDRB atas harga konstan Kabupaten Jember Tahun 1990/1991-1999/2000 (dalam ribuan rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Perkembangan	
			Rupiah	Persentase
1	1990/91	920.876,90		
2	1991/92	980.601,44	59.724,54	6,48
3	1992/93	1.684.499,53	703.898,06	71,78
4	1993/94	1.774.354,63	89.855,10	5,33
5	1994/95	1.996.704,71	222.350,08	12,53
6	1995/96	2.170.699,24	173.994,53	8,71
7	1996/97	2.269.330,52	98.631,28	4,54
8	1997/98	2.097.376,00	-171.954,52	-7,57
9	1998/99	2.136.385,25	39.609,25	1,88
10	1999/00	2.288.046,19	151.660,94	6,62
Rata-rata			151.641,02	12,25

Sumber: Jember dalam Angka tahun 1990-2000 (data diolah)

Pada PDRB Kabupaten Jember terdapat 9 lapangan usaha yaitu pertanian; penggalian dan penambangan; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; jasa-jasa. Tiga sektor utama yang paling memberikan kontribusi yang nyata terhadap total PDRB adalah sektor pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi yang terkecil pada PDRB atas harga konstan adalah pada sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 0,49%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 .

Tabel 4. Rata-rata perkembangan PDRB menurut harga konstan pada masing-masing sektor di Kabupaten Jember tahun 1999

Sektor-sektor	Persentase perkembangan
Pertanian	40,41
Pertambangan dan penggalian	0,49
Industri pengolahan	7,02
Listrik, gas, dan air bersih	1,36
Bangunan	2,76
Perdagangan, hotel dan restoran	21,66
Pengangkutan dan komunikasi	6,84
Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	7,22
Jasa-jasa	12,22

Sumber: Jember dalam angka tahun 1999 (data diolah)

Berikut ini perkembangan sektor-sektor pemberi kontribusi pada PDRB menurut harga konstan pada tahun 1999 di Kabupaten Jember :

a) Sektor Pertanian

Pada sektor pertanian di Kabupaten jember mencakup tanaman bahan pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasilnya, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 1999 sub sektor tanaman bahan pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 52,32%, sedang kontribusi terkecil pada kehutanan yaitu sebesar 0,64%.

Pada subsektor tanaman bahan pangan luaslahan yang ditanam sebanyak 150.766 Ha (meliputi padi dan palawija) yang menghasilkan produksi sebesar 721.147 ton dengan tingkat rata-rata pertahun sebesar 23,51 %. Pembangunan sub sektor pertanian tanaman bahan pangan di Kabupaten Jember terus ditingkatkan untuk memelihara kemandirian swasembada pangan.

Pada subsektor perkebunan pada tahun 1999 luas lahan yang ditanam khususnya pada tanaman perkebunan rakyat tembakau sebesar 11.259 dengan produksi sebesar 133.861 ton.

b) Sektor Perdagangan, hotel, dan restoran

Pada sektor Perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertanian yaitu sebesar 21,66% dari total PDRB menurut harga konstan tahun 1999.

Komoditi perdagangan di Kabupaten DATI II Jember didominasi oleh hasil dari tanaman bahan pangan dan perkebunan seperti tembakau, kopi, dan kakao.

Nilai ekspor Kabupaten Jember tahun 1998 sebesar US\$ 103.516.184,7 sedangkan pada tahun 1997 tercatat sebesar US\$ 97.899.467,5 atau naik sebesar 5,74%. Dari nilai ekspor tersebut komoditi-komoditi perkebunan memberikan kontribusi terbesar yakni 99,19% dari total ekspor.

Sektor ini juga didukung sarana seperti adanya pasar sebanyak 25 buah yang tersebar di berbagai kecamatan di kabupaten Jember. Kecamatan Sumbersari sebanyak 11 buah, Kecamatan Arjasa 2 buah, Kecamatan Kalisat 3 buah, kecamatan Kaliwates 5 buah dan sisanya tersebar di Kecamatan Tanggul, Balung, serta Ambulu. Fungsi pasar tersebut untuk memperlancar hubungan antara penjual dan pembeli.

Sejalan dengan berkembangnya sektor perdagangan dan pariwisata banyaknya hotel di Kabupaten Jember tahun 1999 tidak berubah dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 29 hotel. Dengan komposisi banyaknya hotel

berbintang 2 buah, pra hotel berbintang 1 buah dan hotel melati 26 buah. Jumlah kamar yang ada sebanyak 502 kamar dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 1102 buah. Jumlah restoran/rumah makan yang ada di Kabupaten Jember sebanyak 53 buah.

c) Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa memberikan kontribusi terbesar ketiga. Sektor jasa-jasa selama tahun 1999 Sub sektor pada sektor jasa-jasa adalah sub sektor jasa pemerintahan umum, dan pertahanan yang memberikan kontribusi sebesar 67,93% dan pemberi kontribusi terbesar lainnya adalah sub sektor jasa sosial dan kemasyarakatan dan sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 13,73% dan 16,89%.

Pada sub sektor jasa sosial dan kemasyarakatan terdapat sarana dan prasarana yaitu berupa rumah sakit umum 4 buah, rumah sakit khusus 1 buah, rumah sakit bersalin 4 buah, apotek 25 buah dan toko obat berijn 47 buah.

d) Sektor Industri Pengolahan

Pada sektor ini kontribusi yang diberikan sebesar 7,02% dari total PDRB menurut harga konstan di Kabupaten DATI II Jember tahun 1999. Adapun Industri Pengolahan yang ada di kabupten Jember antar lain Industri makanan, minuman dan tembakau, Industri barang galian, Industri kayu dan barang-barang dari kayu dan Industri barang-barang dari kertas. Jumlah Industri besar sebanyak 34 buah dan 93 buah Industri sedang. Dengan klasifikasi bahwa Industri besar adalah industri yang memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih dan industri sedang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Tenaga kerja yang mampu diserap dari sejumlah industri pengolahan yang ada di Kabupaten DATI II Jember mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 153.351 orang.

e) Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Keberadaan perbankan merupakan salah satu faktor pendukung kelancaran kegiatan ekonomi karena dengan adanya bank di suatu daerah dapat memobilisasi dana yang menganggur. Adanya Bank Indonesia di Kabupaten Jember selain sebagai pengawas, pengatur kinerja bank komersial yang ada di Kabupaten Jember dan di wilayah ex karesidenan Jember. Keberadaan bank komersial di Kabupaten DATI II Jember yang merupakan sarana pendukung untuk kelancaran kegiatan ekonomi di daerah yang berjumlah 31 buah.

f) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor ini menyumbang sebesar 6,84% dari total PDRD menurut harga konstan yang diterima. Kereta Api merupakan salah satu sarana transportasi massal yang murah selain bus. Jasa penunjang angkutan di Kabupaten DATI II Jember terdapat 11 stasiun Kereta Api dan 5 buah terminal.

Sarana komunikasi yang ada di kabupaten Jember semakin meningkat. Jumlah stasiun Sentral Telepon Otomat (STO) berjumlah 5 buah. Sambungan telepon yang ada di Kabupaten Jember tahun 1999 sebanyak 5342 otomat dan 3354 manual.

g) Sektor Bangunan

Sektor ini menyumbang sebanyak 2,76% dari total PDRB yang diterima menurut harga konstan. Pada sektor ini meliputi bangunan fisik seperti jembatan, jalan dan bangunan lainnya. Di Kabupaten DATI II Jember terdapat 7 buah jembatan dan 80.330,75 Km jalan yang merupakan jalan propinsi dan jalan nasional yang kesemuanya berfungsi untuk memperlancar transportasi lalu lintas perekonomian.

h) Sektor Penggalian, Listrik, Gas, dan Air Bersih

Pada sektor ini memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 1,85%. Sektor Penggalian di Kabupaten DATI II Jember terdapat 15 tempat penggalian yang dikelola oleh pihak swasta yang meliputi bahan material

bangunan seperti pasir dan batu ceper/kerikil. Di Kabupaten DATI II Jember pelanggan PLN dan PDAM mengalami peningkatan sejalan dengan berkembangnya perekonomian dan meningkatnya taraf hidup masyarakat.

4.2 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Formulasi regresi linier berganda adalah Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD sebagai variabel bebas dan variabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember sebagai variabel terikat.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Pengaruh Subsidi dari Pemerintah Pusat (SP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember (G) Tahun 1990/1991-1999/2000

No	Variabel		Koefisien Regresi	Pegujian	
	Bebas	Terikat		t _{hitung}	t _{tabel}
1	SP	G	0,791	3,444	2,365
2	PAD		0,411	2,756	2,365
3	Konstanta=6,725				
4	R ² =0,778		F _{hitung} =15,633	F _{tabel} =4,74	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Lampiran 4

Berdasarkan tabel 5 atau lampiran 4 maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$G=6,725+0,791SP+0,411PAD$$

Dimana:

G =Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember

SP =Subsidi dari Pemerintah Pusat

PAD =Pendapatan Asli Daerah

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai $b_0=6,725$ menunjukkan bahwa tanpa adanya Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD, maka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember sebesar 6,725.
- b. Pengaruh Subsidi dari Pemerintah Pusat terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah Kabupaten Jember positif yang ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,791. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Subsidi dari Pemerintah Pusat meningkat sebesar 1%, maka akan menyebabkan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember sebesar 0,791% dengan asumsi variabel PAD dianggap konstan.
- c. Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember positif yang ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,411. Hal ini menunjukkan bahwa apabila PAD meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember sebesar 0,411% dengan asumsi variabel Subsidi dari Pemerintah Pusat dianggap konstan
- d. Besarnya Kontribusi variabel Subsidi dari Pemerintah Pusat terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah kabupaten Jember adalah dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2) Dari lampiran 4 diketahui bahwa kontribusi dari Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD adalah sebesar 0,778 atau 77,8% yang berarti bahwa Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD mempunyai kontribusi terhadap naik/turunnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember

adalah 0,778 atau 77,8% sedangkan sisanya 0,222 atau 22,2% ditentukan oleh variabel selain Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD.

e. Pengujian hipotesis secara serentak/bersama

Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan dari lampiran 4 diketahui bahwa F hitung sebesar 15,633 dan F tabel sebesar 4,74. Melihat hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel maka memenuhi kriteria bahwa hipotesis (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak, dengan kata lain bahwa Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember.

f. Pengujian hipotesis secara parsial/individu

Analisa uji t diketahui bahwa Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD secara individu berpengaruh secara signifikan. Hal ini dapat diketahui bahwa t hitung dari variabel Subsidi dari Pemerintah Pusat sebesar 3,444 dan variabel PAD t hitung sebesar 2,756 sedangkan t tabel sebesar 2,365. Melihat hasil perhitungan tersebut maka memenuhi kriteria bahwa hipotesis (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak, dengan kata lain bahwa Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember.

4.2 Pembahasan

Angka elastisitas variabel Subsidi dari Pemerintah Pusat sebesar 0,791%. Ini menunjukkan bahwa Subsidi dari Pemerintah Pusat mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember tahun 1990/1991-1999/2000 yaitu sebesar 0,791% dan 0,209% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Penelitian Prawiroardjo (1999) menunjukkan bahwa variabel Subsidi dari Pemerintah Pusat berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kotamadya Malang. Subsidi dari Pemerintah Pusat merupakan instrumen yang diharapkan dapat memacu peningkatan perekonomian daerah. Hakikat pemberian Subsidi adalah untuk memperkuat otonomi daerah karena itu daerah perlu memiliki kekuasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Arsjad, 1990:54).

Harrod-Dommar (Sukimo, 1985:287) menyatakan bahwa pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan sesuatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Peranan pembentukan modal ini berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Peranan Subsidi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah khususnya memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Davey (1988) menyatakan bahwa Subsidi dari Pemerintah Pusat digunakan antara lain untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adanya kebebasan/keleluasaan menggunakan Subsidi dari Pemerintah Pusat menyebabkan daerah betul-betul dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong peningkatan Perekonomian Daerah. Subsidi dari Pemerintah Pusat akan dapat meningkatkan perekonomian daerah yang diwujudkan peningkatan Pendapatan Regional, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan

perolehan kapasitas perpajakan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Angka elastisitas variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,411%. Ini menunjukkan bahwa PAD mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Jember tahun 1990/1991-1999/2000 sebesar 0,411% dan 0,589% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Penelitian Siswoyo (1998) menunjukkan bahwa variabel PAD mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Peningkatan PAD berhubungan erat dan berhubungan timbal balik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Kaho, 1988:82). Dimana dengan meningkatnya PAD akan menambah penerimaan daerah, dengan meningkatnya penerimaan daerah maka akan dapat membiayai sektor-sektor ekonomi yang ada di daerah tersebut sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka sektor-sektor ekonomi yang meningkat tersebut akan meningkatkan penerimaan PAD melalui pos pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD.

Sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Jember yang meningkat dengan cepat dan memberikan kontribusi terbesar adalah Sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Sektor-sektor tersebut telah memberikan nilai tambah yang cukup tinggi dibandingkan produk disektor lainnya di Kabupaten Jember. Hal ini akan memberikan balas jasa yang tinggi dan cepat kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat. Meningkatnya pendapatan masyarakat ini akan meningkatkan pengeluaran konsumsi terhadap barang dan jasa. Apabila terhadap penggunaan atau pemakaian barang dan jasa tersebut, Pemerintah Daerah memungut Pajak daerah dan Retribusi Daerah hal ini akan meningkatkan Penerimaan Daerah, khususnya dari pos PAD.

Subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang kecil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kabupaten Jember pada tahun 1990/1991-1999/2000. Hal ini disebabkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu faktor tabungan masyarakat dan investasi yang ada di Kabupaten Jember. Dan penggunaan dari Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak sepenuhnya digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang ada tetapi digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. subsidi dari Pemerintah Pusat mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember sebesar 0,791% .
2. pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember sebesar 0,411% .
3. kontribusi Subsidi dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember tahun 1990/1991-1999/2000 kecil disebabkan oleh pengaruh dari faktor tabungan masyarakat dan investasi.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil analisa diatas, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan:

1. subsidi dari Pemerintah Pusat hendaknya digunakan untuk membiayai sektor-sektor ekonomi yang mampu menyumbang kepada Penerimaan Daerah. Dengan perkembangan dari sektor-sektor ekonomi tersebut maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember diharapkan meningkat secara signifikan.
2. mengurangi pengucuran dana/bantuan pada sektor-sektor ekonomi yang dianggap kurang efisien, agar tidak terjadi bantuan yang salah sasaran maka hendaknya dilakukan survey oleh departemen yang terkait pada sektor-sektor ekonomi mana yang mampu menggerakkan roda perekonomian dan peningkatan penerimaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, M. 1998. **Pembangunan Nasional Berkelanjutan**. Lembaga Penerbitan UI. Jakarta

Arsjad, N. 1990. **Hubungan Fiskal Antar Pemerintah di Indonesia**. Analisis Tahun XIX No.3 Mei/Juni

_____. 1992. **Keuangan Negara**. Intermedia. Jakarta

Birawan, S. 1992. **Pembiayaan Pemerintah Daerah di Indonesia**. LP-UI. Jakarta

Biro Pusat Statistik. 1988-1999. **Jember dalam Angka**. BPS Jatim

_____. 1988-1999. **Produk Domestik Regional Bruto**. BPS Jatim

Davey, K. 1988. **Pembiayaan Pemerintah Daerah**. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta

Devas, N. 1989. **Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia**. Lembaga Penerbit UI. Jakarta

Gujarati, D. 1995. **Ekonometrika Dasar**. Erlangga. Jakarta

Harun, H. 1990. **Penuntun Analisis Peningkatan Dana Pembangunan Kota**. Andi Offset. Yogyakarta.

Hendrawan, S. 1996. **Pengaruh Block Grant terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Bojonegoro**. Skripsi. Surabaya. tidak dipublikasikan

Irawan. Suparmoko. 1995. **Ekonomi Pembangunan**. BPFE. Jakarta

Judissen, R. 1997. **Perpajakan**. PT Gramedia Pustaka Tama. Jakarta

Kaho, J. R., 1988. **Prospek Otonomi Daerah di Indonesia**. UI Press. Jakarta

Kamaluddin, R. 1984. **Keuangan Daerah Kotamadya Padang Panjang; Profil, Potensi, dan Pembangunan**. Dalam Ekonomi dan Keuangan Indonesia vol XXXII No. 1 Maret 1984. LPEM FE-UI. Jakarta

Kristiadi. 1992. **Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta

Prawiroardjo, N. 1999. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dati di Indonesia Menghadapi In.plementasi UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 (Studi Kasus Kotamadya Malang)**. Dalam Jurnal Penelitian .Desember 1999. Vol XII no.3. Surabaya

Republik Indonesia. 1999. **Undang-undang RI Nomer 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomer 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah**. Jakarta: Restu Agung

_____ . 1998. **Garis-garis Besar Haluan Negara**. Pabelan. Jakarta

_____ . 1999. **Nota Keuangan Negara**. Departemen Keuangan RI. Jakarta

Riphat, S. 2000. **Tahapan Impemetasi UU Otonomi Daerah: Suatu Pendekatan Keuangan Daerah**. Makalah Seminar Program Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jakarta 8 Februari 2000

Raharjo, P. 1985. **Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri. Jakarta. Pengantar Ekonomika. BPF. Yogyakarta

Santoso, B. 1995. **Retribusi Sebagai PAD**. dalam Prisma No.4 April 1995. LP3ES. Jakarta

Simanjuntak, R. 1999. **Indonesia Sustaining Development**. Bank Dunia. Makalah

Siswoyo, H.1998.**Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 1988-1997**. Skripsi.Surabaya.tidak dipublikasikan

Soetrisno,P.H.1990.**Dasar-dasar Kebijakananaan Keuangan dan Fiskal**.BPFE.Yogyakarta

Soelistyo.1982.**Ekonometrika I**.BPFE.Yogyakarta

Sukirno, S.1985.**Ekonomi Pembangunan:Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakananaan**.LPFE UI.Jakarta

Supranto, J.1990.**Ekonometrika Buku Satu Edisi Kedua**.LPFE-UI.Jakarta

Sumodiningrat, P.1996.**Dasar-dasar Pembangunan Nasional Berkelanjutan**.BPFE.Yogyakarta

Suparmoko, M.1990.**Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek**.BPFE-UGM.Yoyakarta

Tjokroamijoyo.1998.**Kebijakananaan dan Administrasi Pembangunan**.LP3ES.Jakarta

Yuwono, P.1999.**Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 (Studi Kasus Kotamadya Dati II Salatiga)**.Kritis Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol XII No.2.Penerbit UKSW Salatiga

Lampiran 1

Subsidi dari Pemerintah Pusat pada Kabupaten Jember
Tahun 1990/1991-1999/2000 (dalam ribuan rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Pertumbuhan	
			Rupiah	Persentase
1	1990/91	5.488.110,00		
2	1991/92	5.804.161,00	316.051,00	5,75
3	1992/93	7.698.748,00	1.894.587,00	32,64
4	1993/94	8.553.124,00	854.376,00	11,09
5	1994/95	9.368.108,00	814.984,00	9,52
6	1995/96	11.557.990,00	2.189.882,00	23,37
7	1996/97	13.595.222,00	2.037.232,00	17,62
8	1997/98	14.051.046,00	455.824,00	3,35
9	1998/99	134.099.118,00	120.148.072,00	854,37
10	1999/00	147.670.837,00	13.571.719,00	9,19
Rata-rata			15.872.157,33	107,42

Sumber: Jember dalam Angka tahun 1990-2000 (data diolah)

Lampiran 2

Pendapatan Asli Daerah Kabupten Jember (dalam ribuan rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Perkembangan	
			Rupiah	Persentase
1	1990/91	4.698.565,00		
2	1991/92	5.534.949,00	836.384,00	17,96
3	1992/93	6.494.500,00	959.551,00	17,34
4	1993/94	6.558.851,00	64.351,00	0,99
5	1994/95	8.110.296,00	1.551.445,00	23,65
6	1995/96	10.709.882,00	2.599.599,00	32,05
7	1996/97	15.048.073,00	433.819,00	40,51
8	1997/98	13.589.542,00	145.853,00	-9,69
9	1998/99	17.467.778,00	3.878.236,00	28,54
10	1999/00	24.378.547,00	6.910.236,00	39,56
Rata-rata			1.542.223,00	21,21

Sumber: Jember dalam Angka tahun 1990-2000 (data diolah)

Lampiran 3

PDRB atas harga konstan Kabupaten Jember
Tahun 1990/1991-1999/2000 (dalam ribuan rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Perkembangan	
			Rupiah	Persentase
1	1990/91	920.876,90		
2	1991/92	980.601,44	59.724,54	6,48
3	1992/93	1.684.499,53	703.898,06	71,78
4	1993/94	1.774.354,63	89.855,10	5,33
5	1994/95	1.996.704,71	222.350,08	12,53
6	1995/96	2.170.699,24	173.994,53	8,71
7	1996/97	2.269.330,52	98.631,28	4,54
8	1997/98	2.097.376,00	-171.954,52	-7,57
9	1998/99	2.136.385,25	39.609,25	1,88
10	1999/00	2.288.046,19	151.660,94	6,62
Rata-rata			151.641,02	12,25

Sumber: Jember dalam Angka tahun 1990-2000 (data diolah)

Lampiran 4

Analisis Regresi Berganda untuk mengetahui Pengaruh Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
G	9,2080	,1904	10
SP	10,1507	,5563	10
PAD	10,0840	,4261	10

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD, SP ^a		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: G

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,889 ^a	,778	,667	,1691

- a. Predictors: (Constant), PAD, SP

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,126	2	6,313E-02	15,633	,000 ^a
	Residual	,200	7	2,859E-02		
	Total	,326	9			

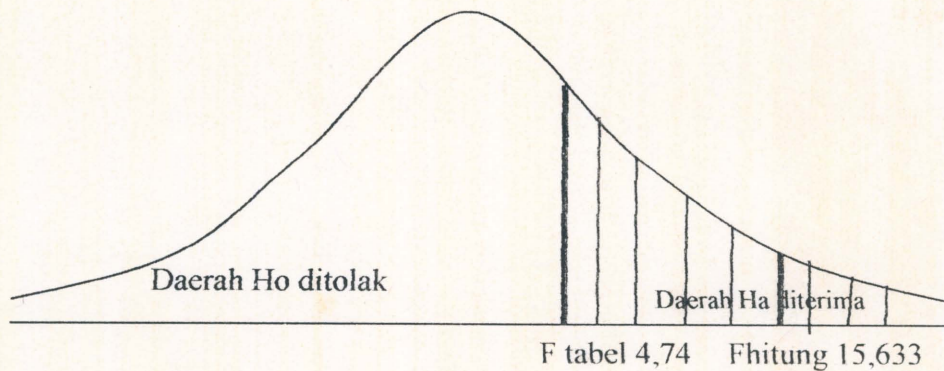
- a. Predictors: (Constant), PAD, SP
- b. Dependent Variable: G

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,725	1,387		4,847	,002
	SP	,791	,229	,380	3,444	,000
	PAD	,411	,299	,258	2,756	,001

a. Dependent Variable: G

Lampiran 5. Kriteria F test dengan uji signifikan satu arah dan tingkat keyakinan 95% untuk variabel Subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah

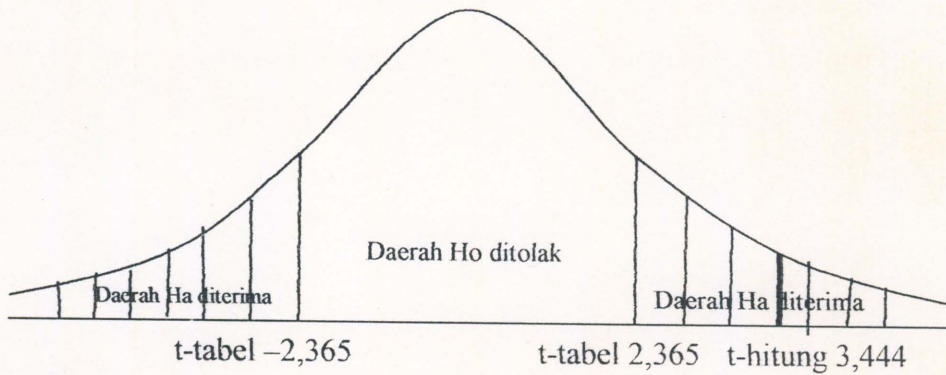


Ho: $\beta_1 = 0$ secara bersama variabel Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Jember $F_{tabel} \leq F_{hitung}$

Ha: $\beta_2 \neq 0$ secara bersama variabel Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD berpengaruh terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Gambar di atas menjelaskan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka Ho di tolak dan Ha diterima berarti variabel Subsidi dari Pemerintah Pusat dan PAD secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember.

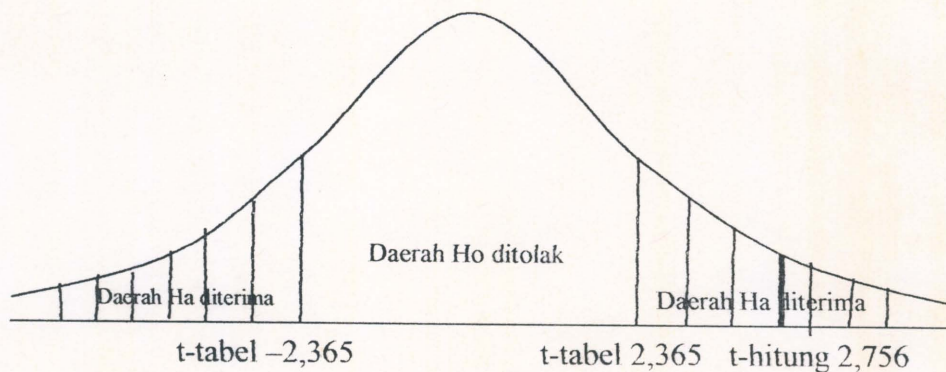
Lampiran 6 Kurva Daerah Penolakan dan Penerimaan dengan Uji-t Dua Arah Pada tingkat Keyakinan 95% untuk Variabel Bebas Subsidi dari Pemerintah Pusat



- $H_0: \beta_1 = 0$ secara parsial variabel bebas X_1 tidak berpengaruh terhadap variabel terikat dimana $-t_{\alpha/2} \leq t_{hitung} \leq t_{\alpha/2}$
- $H_a: \beta_2 \neq 0$ secara parsial variabel bebas X_2 berpengaruh terhadap variabel terikat dimana $t_{hitung} < -t_{\alpha/2}$ atau $t_{hitung} > t_{\alpha/2}$

Gambar di atas menjelaskan bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka H_0 tidak diterima, berarti variabel Subsidi dari Pemerintah Pusat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember.

Lampiran 7 Kurva Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 dengan Uji $-t$ Dua Arah pada Tingkat Keyakinan 95% untuk variabel bebas Pendapatan Asli Daerah .



$H_0: \beta_1 = 0$ secara parsial variabel bebas X_1 tidak berpengaruh terhadap variabel terikat dimana $-t_{\alpha/2} \leq t_{hitung} \leq t_{\alpha/2}$

$H_a: \beta_2 \neq 0$ secara parsial variabel bebas X_2 berpengaruh terhadap variabel terikat dimana $t_{hitung} < -t_{\alpha/2}$ atau $t_{hitung} > t_{\alpha/2}$

Gambar di atas menjelaskan bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka H_0 tidak diterima, berarti variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember.